

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Indeks Pembangunan Manusia**

##### **1. Konsep Pembangunan Manusia**

Banyak ahli ekonomi yang akan sependapat bahwa bukanlah sumber daya modal atau materi yang sepenuhnya menentukan karakterisasi dan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial, melainkan sumber daya manusia suatu bangsa. Pandangan yang mewakili pandangan ini dilontarkan oleh Profesor Frederick Harbison yang berpendapat bahwa :

Sumber daya manusia merupakan landasan utama bagi kesejahteraan setiap negara. Sumber daya modal dan alam merupakan faktor-faktor produksi yang pasif sedangkan manusia merupakan fraktor produksi aktif yang dapat mengakumulasikan modal, mengelola sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi dan politik serta melaksanakan pembangunan nasional lebih lanjut. Jelasnya, suatu negara yang tidak mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan serta kecakapan penduduknya maupun memanfaatkannya secara efektif di dalam ekonomi nasional berarti tidak akan mampu mengembangkan apa pun juga.<sup>1</sup>

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya. Semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi

---

<sup>1</sup> Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang Suatu Pengantar tentang Prinsip-Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995). 385.

dalam mencapai tujuan itu.<sup>2</sup> Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan. Secara makro, faktor-faktor masukan pembangunan, seperti sumber daya alam, materil, dan finansial, tidak akan member manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat tanpa didukung oleh ketersediaan faktor sumber daya manusia yang memadai, sumber daya manusia inilah yang mendukung tercapainya kemajuan di suatu daerah.<sup>3</sup>

Pembangunan manusia merupakan hal yang mutlak dilakukan guna mencetak sumberdaya manusia yang memadai untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai sektor. Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM. Pemerintah hendaknya memperhatikan hal tersebut terlebih jika memandang manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, sehingga pembangunan manusia yang kemudian menunjang pembangunan di berbagai sektor akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintahan tersebut. Pembangunan manusia merupakan hal yang penting terutama bagi sebagian negara khususnya negara yang sedang berkembang hal ini disebabkan oleh karena banyak negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun gagal dalam menghadapi masalah kesenjangan

---

<sup>2</sup> Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Kencana, 2009), 1.

<sup>3</sup> Mila Badriyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 13.

sosial dan meningkatnya kemiskinan selain itu pembangunan manusia sebenarnya merupakan investasi tidak langsung terhadap pencapaian tujuan perekonomian nasional.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Pembangunan Manusia

Sejak tahun 1990 *United Nations for Development Program* (UNDP) mengembangkan suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah indeks pembangunan manusia (*Human Development Index = HDI*). Indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah : (1) tingkat harapan hidup, (2) tingkat melek huruf masyarakat, dan (3) tingkat pendapatan riil perkapita berdasarkan daya beli.<sup>5</sup>

UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Pembangunan manusia pada dasarnya mempunyai empat komponen utama yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), 206.

<sup>5</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-4*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2004), 37-38.

a. Produktivitas (*Productivity*)

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan (*Equity*)

Penduduk harus memiliki kesempatan/peleluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan social. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

c. Kestinambungan (*Sustainability*)

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan social harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang aka datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

d. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Melalui peningkatan keempat komponen tersebut secara maksimal maka pembangunan manusia akan dapat berhasil dengan baik, yang dicirikan oleh peran manusia sebagai agen

pembangunan yang efektif. Untuk mencapai hal itu maka penduduk suatu negara atau daerah paling tidak harus memiliki peluang berumur panjang dan sehat, memiliki tingkat pendidikan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif sehingga memiliki pendapatan yang cukup dan memiliki daya beli serta kemauan untuk melakukan konsumsi bagi pemenuhan kebutuhannya.<sup>6</sup>

### 3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

---

<sup>6</sup> Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014), 217-218.

Komponen indeks pembangunan manusia yaitu sebagai berikut :

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson, yaitu ukuran kesenjangan pendapatan yang dikembangkan oleh ekonom Inggris, Anthony Barnes Atkinson. Ukuran ini mampu menangkap perubahan atau pergerakan pada segmen-segmen yang berbeda dari distribusi pendapatan.

Keterangan :

C(i) = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp549.500 per kapita per tahun atau Rp 1.500 per kapita per hari.<sup>7</sup>

#### 4. Pembangunan Manusia Menurut Perspektif Islam

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar pembangunan nasional. Oleh karena itu, maka kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Negeri yang kaya dengan sumber daya alam, tidak secara otomatis memberikan kemakmuran bagi warga masyarakatnya, jika sumber daya manusia tidak memiliki kemampuan (*skill*) dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sebaliknya, sebuah negeri yang miskin akan sumber daya alam, namun memiliki kemampuan yang memadai akan lebih cepat berkembang dibandingkan negeri yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan ganda, baik sebagai objek dan subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan manusia SDM merupakan sasaran pembangunan untuk mendapat kesejahteraan, sedangkan sebagai subjek pembangunan, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan.<sup>8</sup>

Paling tidak ada tiga faktor yang dijadikan tolak ukur oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) akan keberhasilan suatu pembangunan yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga unsur ini pun mendapat perhatian yang

---

<sup>7</sup> Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 40/07/36/Th.X, 1 Juli 2016.

<sup>8</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2015), 176-

cukup besar dalam Islam sebagai faktor penting dalam pembangunan manusia itu sendiri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ أَمَّنًا فِي سَرِيهِ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمِهِ فَكَأَنَّ نَمَّ  
جِيَزَتْ لَهُ الدُّنْيَا (رواه الترمذي)

*“Barang siapa di antara kamu melewati harinya dengan perasaan aman, sehat tubuhnya dan cukup persediaan makanan pokoknya untuk hari itu, seakan-akan ia telah diberi semua kenikmatan dunia.”* (H.R. Tirmidzi)

Namun bagi Islam, faktor manusia lah yang lebih berperan dalam sebuah pembangunan. Tentu saja yang dimaksud oleh Islam adalah manusia yang berperilaku dengan akhlak Islam, manusia yang bebas dan merdeka, manusia dengan tauhid yang bersih. Semua hal ini dapat dicapai tentu saja melalui tarbiyah insaniyah itu sendiri. Pendidikan yang menyeluruh dan bukan sebagian saja. Manusia merupakan elemen hidup dan pokok dari setiap program pembangunan. Mereka adalah tujuan sekaligus sebagai sasaran pembangunan, dan apabila mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kepentingan dirinya tidak dilindungi dalam batas-batas kesejahteraan sosial, tidak mungkin akan berhasil mengaktualisasikan tujuan-tujuan pokok Islam dalam pembangunan.<sup>9</sup>

Sebagai wakil, maka segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah SWT. Pemahaman ini mengantarkan

---

<sup>9</sup> M. Umer Chapra, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 85-86.

manusia menunaikan hak-hak Allah sebagai pemilik utama dalam bentuk kebaikan seperti zakat, sedekah dan lain sebagainya. Upaya pembangunan manusia itu dapat dimulai dengan peningkatan kemampuan melalui pendidikan. Ilmu pengetahuan dan Islam dipandang sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan suluh penerang kehidupan sekaligus nafas peradaban. Kemajuan peradaban Islam pada masa Abbasiyah di Irak hingga Andalusia di Spanyol (abad 7 M – 13 M), berkat kemajuan ilmu pengetahuan pada masa itu.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang turut menyumbang kepada peningkatan dalam sektor pembangunan. Pembangunan adalah terikat secara langsung dengan perkembangan sumber manusia dimana pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan yang terdiri daripada pembangunan material, fisik dan spiritual. Sumber manusia yaitu tahap pendidikan dan ilmu yang ada merupakan salah satu modal dalam pembangunan Negara karena peningkatan yang berlaku dalam sumber manusia akan memberikan manfaat yang baik kepada pembangunan Negara. Faktor pendidikan menjadi salah satu indikator terpenting dalam menentukan tingkat pembangunan sebuah Negara.<sup>10</sup> Begitu banyak ayat yang membicarakan akan keutamaan ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Az-Zumar ayat 9 sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> <http://djibran.staff.ipb.ac.id/2017/03/25/islam-dan-indeks-pembangunan-manusia/> Ekonomi Syariah and tagged Islamic Indeks Pembangunan Manusia on March 25, 2017.

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ  
(الزمر : ٩)

“Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran”. (QS. Az-Zumar: 9).

Demikian pula dengan kesehatan. Hanya manusia yang sehat jasmani yang mampu memberikan kemampuan terbaiknya untuk pembangunan. Islam sangat memperhatikan kesehatan dalam semua aspek kehidupan manusia. Baik dalam perkara ibadah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 6 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (المائدة : ٦)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.” (QS. Al-Maidah : 6).

Dalam Islam juga dijelaskan untuk mencari rezeki yang halal dan menyehatkan yang tercantum dalam Al-Qur’an Sebagai berikut :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ  
(النحل : ١١٤)

*Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (QS. An-Nahl : 114).*<sup>11</sup>

## **B. Kemiskinan**

### **1. Pengertian Kemiskinan**

Secara harfiah menurut Poerwadarminta, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya “tidak berharta-benda”. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.<sup>12</sup> Kemiskinan merupakan kata yang amat sulit didefinisikan. Menurut istilah yang paling sederhana, miskin berarti keadaan orang yang mempunyai pendapatan amat rendah. Kamus merumuskan istilah itu hanya sebagai “tidak memiliki uang atau kekayaan materil.”<sup>13</sup> Salah satu pengukur distribusi pendapatan adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan (*poverty rate*) adalah persentase pada populasi dengan keluarga yang pendapatannya berada pada tingkat absolute yang dinamakan garis kemiskinan (*poverty line*).<sup>14</sup> Kekayaan yang diwarisi merupakan faktor kecil dan sebagian besar mengandalkan upah dan gaji, karena kesenjangan pendapatan sebenarnya merupakan

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006), 108 - 459.

<sup>12</sup> Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, (Bandung : Rosda, 2015), 1.

<sup>13</sup> Case & Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi Mikro*, (Jakarta : Indeks Kelompok Gramedia, 2007), 422.

<sup>14</sup> N. Gregory Mankiw, Euston Quah dan Peter Wilson, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), 413.

masalah mendasar dalam kemiskinan, terutama dinegara berkembang.<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.<sup>16</sup>

Kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat

---

<sup>15</sup> Tom Gorman, *The Complete Ideal's Guides Economics*, (Jakarta : Prenada, 2009), 183.

<sup>16</sup> Nunung Nurwati, "Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan", Vol. X, No. 1, (Januari, 2008), 1.

mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya. Dan aspek lainnya dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Kita sering mendengar istilah kemiskinan perdesaaan, kemiskinan perkotaan dan sebagainya. Namun demikian, bukan berarti desa atau kotanya yang mengalami kemiskinan, tetapi orang-orang atau penduduk (manusianya) yang menderita miskin. Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini masih tetap relevan dan penting untuk dikaji dan diupayakan penanggulangannya, jika ingin mencapai tujuan pembangunan nasional dan pembangunan manusia yang adil dan merata.<sup>17</sup>

Selain tingkat kemiskinan, ada dua hal lain yang juga harus diperhatikan yakni kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. (1) Kedalaman kemiskinan menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas miskin (garis kemiskinan yang berlaku); (2) Keparahan kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran dari penduduk paling miskin atau yang makin jatuh dibawah garis kemiskinan yang berlaku. Semakin besar nilai kedua indeks ini disebut negara mencerminkan semakin seriusnya persoalan kemiskinan di daerah tersebut.<sup>18</sup>

## **2. Penyebab Kemiskinan**

Sharp mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Kemiskinan muncul karena

---

<sup>17</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : STIE YKPN, 2004), 237.

<sup>18</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2013), 193.

adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Selain itu, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Kemiskinan muncul juga akibat adanya perbedaan akses dalam modal. Penyebab kemiskinan diatas berakibat pada munculnya teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas, seterusnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima dan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya, logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse.

Adapun penyebab kemiskinan jika di pandang secara ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya akses terhadap lapangan pekerjaan. Tingkat kesempatan kerja adalah rasio antara jumlah penduduk yang

bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pada negara berkembang rasio tersebut lebih rendah dari negara maju sehingga jumlah kemiskinan di negara berkembang lebih tinggi dari negara maju.

b. Lemahnya akses masyarakat terhadap faktor produksi. Lemahnya akses masyarakat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Rendahnya akses modal usaha. Hal tersebut menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu mengembangkan usahanya.
- 2) Lemahnya masyarakat dalam mengakses pasar.
- 3) Sedikitnya kepemilikan aset.

Selain penyebab kemiskinan dipandang secara ekonomi, penyebab kemiskinan juga dapat dilihat secara sosial. Adapun hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Rendahnya akses pendidikan. Pada negara terbelakang, pendidikan masyarakatnya masih rendah sehingga tingkat produktivitasnya rendah dan akhirnya berdampak pada rendahnya penghasilan yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan.
- b) Rendahnya akses fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan di negara terbelakang jauh lebih sedikit dan kualitasnya tertinggal dari negara maju. Pada masyarakat yang berkorelasi positif antara kemiskinan dengan akses kesehatan, diperlukan cara keluar dari rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan dengan melakukan

proteksi terhadap masyarakat miskin melalui program seperti jamkesmas.<sup>19</sup>

### **3. Bentuk Dan Jenis Kemiskinan**

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah sebagai berikut :

#### **a. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

#### **b. Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan

---

<sup>19</sup> Christina Usmaliadanti, “*Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2007-2009*”, (Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), 58-60.

masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerahdaerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif. Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negara-negara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya.

Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

a. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan prasarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

b. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*developmentalism*) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Lingkaran perangkap kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi satu

sama lain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan keadaan akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai pembangunan pada tingkat pembangunan yang sangat tinggi. Teori lingkaran perangkap kemiskinan pertama kali dikemukakan oleh R. Nurske, seorang ahli ekonomi yang memelopori penelaahan atas masalah pembentukan modal di negara-negara berkembang.

Lingkaran perangkap kemiskinan dibentuk oleh dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan modal. Sisi penawaran modal yang menimbulkan lingkaran kemiskinan dimulai dari rendahnya tingkat pendapatan karena tingkat produktivitas yang rendah. Sedangkan sisi permintaan modal terutama di negara miskin sebagai stimulasi, untuk melaksanakan penanaman modal sangatlah rendah karena sempitnya pasar.<sup>20</sup>

#### **4. Ciri-Ciri Kemiskinan**

Dengan melihat banyaknya ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang atau sekelompok orang untuk disebut miskin atau tidak miskin, maka umumnya para ahli akan merasa kesulitan dalam mengklasifikasikan masyarakat menurut garis kemiskinan. Namun, dari berbagai studi yang ada pada dasarnya ada beberapa ciri dari kemiskinan yaitu :

- a. Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan.

---

<sup>20</sup> Ahmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan & Analisis Data Empiris*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), 226-227.

- b. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri.
- c. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat Sekolah Dasar.
- d. Banyak diantara mereka yang tinggal didaerah pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau kalaupun ada relative kecil sekali.
- e. Banyak diantara mereka yang hidup dikota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau skill.<sup>21</sup>

## **5. Indikator-Indikator Mengenai Kemiskinan**

Indikator nasional dalam menghitung jumlah penduduk yang hidup miskin ditentukan oleh standar hidup dari Biro Pusat Statistik (BPS). Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Penetapan nilai standar hidup minimum ini digunakan untuk membedakan antara penduduk miskin dan tidak miskin.

Sementara indikator kemiskinan lain yang sering digunakan dan telah memiliki rasionalisasi yang banyak dipercaya oleh sebagian lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang memiliki perhatian terhadap penanggulangan kemiskinan adalah indikator kemiskinan yang dikemukakan

---

<sup>21</sup> Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya*, (Malang : Intrans Publishing, 2013), 5-6.

oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yaitu keluarga prasejahtera dan sejahtera. Disebut keluarga prasejahtera apabila tidak bisa memenuhi beberapa syarat indikator dan sementara yang disebut keluarga sejahtera dapat memenuhi semua indikator tersebut. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dipakai dirumah, bekerja, sekolah dan bepergian.
- c. Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai dan dinding yang baik.
- d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- e. Semua anak umur 7-15 tahun bersekolah.

Indikator kemiskinan yang telah disebutkan di atas, dapat dijadikan panduan dalam rangka menangani masalah kemiskinan. Meskipun dari masing-masing indikator tersebut memiliki cara pandang yang berbeda-beda berdasarkan kepentingan program dari masing-masing lembaga.<sup>22</sup>

## **6. Pandangan Islam Terhadap Persoalan Kemiskinan**

Kata *faqru* (kemiskinan), menurut bahasa maknanya adalah *ihtiyaj* (membutuhkan) Kata *faqru* adalah bentuk masdar, lawan kata dari *ghaniyu*. Hal ini karena bisa saja seseorang membutuhkan sesuatu, sementara dia tidak memiliki

---

<sup>22</sup> Bambang Rustamto, *Menangani Kemiskinan*, 7-8.

sesuatu yang dibutuhkan. Sedangkan kata *faqiir*, menurut pengertian syara' maknanya adalah orang yang membutuhkan plus lemah keadaannya yang tidak bisa dimintai apa-apa.<sup>23</sup> Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

.....وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..... (البقرة : ٢٣٣)

*“Kewajiban Ayah adalah meberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”.* (QS. Al-Baqarah : 233)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْفُوا عَلَيْهِنَّ  
(الطلاق : ٦)

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.....”* (QS ath-Thalaaq : 6).<sup>24</sup>

Tidaklah pernah Islam memandang kemelaratan sebagai suatu kehinaan yang menurunkan derajat orangnya. Islam mengambil ukuran bahwa manusia yang paling dekat dengan Allah ialah orang yang paling berbakti. Dengan demikian, orang-orang miskin yang bagaimanapun melaratnya

---

<sup>23</sup>Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 2009), 228.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006), 37-559.

mungkin lebih tinggi derajatnya dari mereka yang banyak hartanya dan hidup dalam kemegahannya. Inilah bantuan pertama dari islam terhadap orang-orang miskin, kemudian Islam memperhatikan nasib mereka. Ada orang yang melarat karena lemahnya tenaga dari bekerja dan ada pula yang jatuh melarat karena tidak ada jalan untuk mencari penghidupan. Adapun terhadap orang yang lemah karena penyakit yang sukar mengobatinya, Islam menjadikan usaha bantuan baginya suatu kewajiban atas seluruh masyarakat, bukan hanya sokongan dan derma yang boleh dilengahkan. Adapun orang yang tidak mempunyai alat untuk mengusahakan dirinya, Islam mewajibkannya menyediakan alat-alat yang dibutuhkan tersebut. Islam sangat membenci sifat meminta-minta (mengemis) dan memerintahkan supaya tiap-tiap muslim untuk menjauhinya, sebab tangan yang diatas yang memberi lebih baik daripada tangan dibawah yang menerima (meminta).<sup>25</sup>

## **C. Pengangguran**

### **1. Pengertian Pengangguran**

Definisi baku untuk pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian atau perluasan yaitu pengangguran adalah mereka yang sedang

---

<sup>25</sup> Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), 222.

mencari pekerjaan atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja) dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja disebut juga dengan pengangguran terbuka.<sup>26</sup> Keadaan dinegara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup menangani kesempatan kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, masalah pengangguran yang dihadapi dari tahun ke tahun semakin lama semakin tambah serius.<sup>27</sup> Luasnya pengangguran ini mencerminkan baik buruknya perekonomian. Semakin tinggi tingkat pengangguran menunjukkan semakin buruk perekonomian.<sup>28</sup>

Menganggur tidak sama dengan tidak bekerja atau tidak mau bekerja. Orang yang tidak mau bekerja tidak dapat dikatakan sebagai pengangguran. Sebab jika dia mencari pekerjaan mungkin dengan segera mendapatkannya.<sup>29</sup> Pengangguran (*unemployment*) tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi tidak atau belum menemukan pekerjaan. Jadi pengangguran merupakan kelompok orang yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan (mengembangkan) pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya.

---

<sup>26</sup> Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, 65.

<sup>27</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta : Kencana, 2011), 225.

<sup>28</sup> Arfida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), 134-135.

<sup>29</sup> Prathama Raharja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Uviversitas Indonesia, 2008), 180.

## 2. Jenis-Jenis Pengangguran

Macam-macam pengangguran yaitu sebagai berikut :

- a. Pengangguran Friksional, yaitu disebut juga pengangguran sukarela karena tenaga kerja tersebut meninggalkan pekerjaan yang lama untuk mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik.
- b. Pengangguran Struktural, yaitu terjadi karena keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan lapangan kerja yang ada. Pengangguran struktural juga bisa terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian yang menyebabkan penurunan keahlian dibidang lain. Misalnya terjadi industrialisasi pada perekonomian agraris sehingga tenaga kerja dibidang pertanian akan menganggur.
- c. Pengangguran Siklikal, yaitu pengangguran yang muncul karena siklus ekonomi yang sedang mengalami resesi (krisis). Misalnya ketika ekonomi sedang bagus, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Sebaliknya ketika perekonomian resesi dan perusahaan merugi maka akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
- d. Pengangguran Musiman, yaitu pengangguran yang berkaitan dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi disektor pertanian. Misalnya diluar musim tanam dan panen, petani umumnya menganggur sampai menunggu musim tanam berikutnya.
- e. Pengangguran Teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan orientasi yang semula padat karya

menjadi padat modal dengan mengandalkan kemajuan teknologi. Misalnya sebelum ditemukan teknologi mesin bajak, menanam padi dilakukan dengan mencangkul secara bergiliran antara tiga orang petani. Namun dengan menggunakan mesin bajak cukup diselesaikan dengan seorang petani.

- f. Pengangguran Politis, yaitu pengangguran yang terjadi karena terbitnya regulasi baru yang secara langsung atau tidak mengakibatkan pengangguran. Misalnya kenaikan uoah minimum oleh pemerintah daerah karena desakan organisasi buruh memaksa para pengusaha melakukan rasionalisasi dengan jalan meng-PHK karyawannya.
- g. Pengangguran Deflatoir, yaitu pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja.<sup>30</sup>

Konsepsi Keynes mengenai bekerjanya pasar tenaga kerja berbeda dengan kaum Klasik, khususnya dalam hal kemungkinan bahwa pengangguran bisa berlarut-larut. Kaum Klasik mengenal tiga macam pengangguran :

- a) Pengangguran yang timbul karena pergeseran tingkat output dari berbagai sektor dan bersifat sementara (*frictional unemployment*).
- b) Pengangguran musiman, yang datang dan hilang menurut musim (*seasonal unemployment*).
- c) Pengangguran yang dibuat orang misalnya dengan adanya peraturan upah minimum atau tindakan dari serikat buruh

---

<sup>30</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Revisi*, (Banten : LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2013), 107-110.

yang berusaha mempertahankan tingkat upah di atas tingkat yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja (pengangguran semacam ini disebut *institutional unemployment*).

Dalam dunia Klasik, semua harga-harga (termasuk harga tenaga kerja yaitu upah) fleksibel ke atas maupun ke bawah dan semua pelaku ekonomi bereaksi secara cepat dan rasional terhadap perubahan harga tersebut.<sup>31</sup>

### **3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengangguran Di Negara-Negara Berkembang**

#### **a. Kebijakan Pemerintah yang Tidak tepat**

Upaya pelatihan tenaga kerja yang menyebabkan langkanya produk berskill. Keadaan ini akan mendorong pengusaha untuk memilih proses yang mekanis. Bahwa salah satu faktor sukses industrialisasi di Asia Timur yang sangat padat tenaga kerja yaitu bahwa pemerintah-pemerintah di daerah tersebut telah banyak berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan.

#### **b. Distorsi Harga Faktor Produksi**

Tingginya upah di sektor modern, upah yang berlaku untuk tenaga kerja tidak berskill di sektor modern dinegara-negara berkembang seringkali melebihi tingkat tekanan serikat pekerja, dan perusahaan asing yang beroperasi

---

<sup>31</sup> Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi NO. 2 Ekonomi Makro Edisi Keempat*, (Yogyakarta : BPFE, 2014), 69-70.

dinegara tersebut yang biasanya menentukan upah lebih tinggi dari upah domestik.

Jika dihitung secara kasar diseluruh negara berkembang, pendapatan perpekerja dari upah minimum resmi ternyata beberapa kali lebih tinggi dari pada perndapatan perkapita negara tersebut. Hal ini akan menyebabkan pengangguran yang lebih tinggi karena beberapa studi menunjukkan tingkat upah yang tinggi akan mengurangi penyerapan tenaga kerja.

c. Pengangguran Penduduk Berpendidikan Tinggi

Pengangguran tenaga kerja berpendidikan di negara-negara berkembang tersebut disebabkan karena lapangan kerja tidak sesuai dengan kurikulum yang diajarkan di bangku sekolah. Salah satu sebabnya adalah karena kurikulum yang disusun di negara-negara berkembang tersebut lebih condong keilmu-ilmu sosial yang lebih mudah diselenggarakan dari pada ilmu-ilmu alam dan teknik yang sebenarnya lebih dibutuhkan dibanyak perusahaan. Disisi lain para lulusan tersebut lebih suka memilih untuk menunggu pekerjaan yang mereka rasakan cocok dengan pendidikan mereka dan menolak untuk bekerja dibidang lain, terutama jika bayarannya dibawah standar yang mereka inginkan.

#### d. Lapangan Kerja Yang Kurang

Untuk setiap tahunnya mungkin negara kita ini memiliki sejumlah lulusan dengan angka yang tidak sedikit. Akan tetapi dengan angka yang tidak sedikit ini tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di negara ita ini.<sup>32</sup>

Akan tetapi, dimensi permasalahan kesempatan kerja di negara-negara sedang berkembang bukan sekedar akibat kurangnya kesempatan kerja atau belum dimanfaatkannya sumber daya manusia dan rendahnya prosuktivitas dari yang bekerja sepanjang hari. Masalah itu juga meliputi ketidaksesuaian dan pengharapan mendapatkan pekerjaan, terutama dikalangan anak muda yang berpendidikan dan tersedianya pekerjaan yang sesuai di kota dan desa.<sup>33</sup>

#### 4. Pengangguran Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Imam Syaibani kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia. Sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau

---

<sup>32</sup> Zahra Zurisdah, “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten”, (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2016), 25-26.

<sup>33</sup> Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang Suatu Pengantar Tentang Prinsip-prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), 298.

pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.<sup>34</sup> Dalam islam, kerja adalah suatu prinsip bahwa setiap orang Islam diperintahkan untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja akan menempatkan dirinya bergantung pada bantuan orang lain, yang berarti menempatkan tangan mereka dibawah tangan-tangan yang lain.<sup>35</sup>

Islam juga sangat melarang umatnya untuk mengemis, karena mengemis adalah kutukan bagi manusia dan mencendrai kemuliaan seseorang serta kehormatannya. Mengemis sama artinya dengan ketidak percayaan kepada Allah dan ketidak percayaan atas kemampuan diri untuk mendapatkan nafkah melalui kerja keras. Pandangan Al-Qur'an mengenai larangan mengemis ini sangat jelas tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 273 :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٧٣)

*(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang kafir yang terhalang (usahanya karena jihad) dijalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha dibumi, (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah : 273).*<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Nurul Huda Dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Dan Teoretis*, (Jakarta : Kencana, 2009), 227.

<sup>35</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2014), 422.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006), 46.

#### **D. Pengaruh Antara Pembangunan Manusia, Kemiskinan Dan Pengangguran**

Pengaruh antara variabel pembangunan manusia, kemiskinan dan pengangguran mempunyai hubungan yang sangat erat sekali antara pembangunan manusia, luasnya kemiskinan dan tingginya tingkat pengangguran. Lincoln Arsyad berpendapat bahwa :

Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja disektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas.<sup>37</sup>

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran disuatu daerah sangat buruk kekacauan sosial dan politik selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang .

Disamping penjelasan di atas secara konsep, pembangunan manusia merupakan upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup yang layak, yang

---

<sup>37</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-4*, (Yogyakarta : STIE YKPN, 2004), 289.

dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli serta dalam peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan. Dilain pihak ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur maka tidak mempunyai pendapatan tetap dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hal ini akan menyebabkan seseorang itu berada dalam kelompok miskin. Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengkonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati kehidupan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi semuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia disuatu daerah. Jumlah pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan kemakmuran kehidupan masyarakat berkurang. Pendapatan dalam hal ini faktor dominan dalam peningkatan pembangunan manusia.

#### **E. Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan**

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini penulis meninjau terhadap penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014)	Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau 2006-2011.	Tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM masing-masing dengan koefisien regresi sebesar -0,163 dan -0,084. Sedangkan Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM, dengan koefisien regresi masing-masing 0,005 dan 0,953. Variabel yang sangat besar pengaruhnya adalah laju pertumbuhan ekonomi.
2.	Nur Baeti (2013)	Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi	Variabel pengangguran berpengaruh negatif dan

		<p>Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011</p>	<p>signifikan dengan koefisien negatif sebesar 1,96 terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah Tahun 2007-2011. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengangguran mengalami penurunan sebesar 1% maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah sebesar 1,96. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,14 terhadap pembangunan manusia di Jawa Tengah Tahun 2007-2011, hal ini menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan pembangunan manusia</p>
--	--	---	--

			<p>sebesar 0,14. Variabel pengeluaran pemerintah yang dalam hal ini adalah pengeluaran pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien positif sebesar 4,60 terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.</p>
3.	Denni Sulistio Mirza (2012)	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Hasil penelitian regresi panel menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan dengan elastisitas negatif

		Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009.	sebesar 0,208192 terhadap IPM di Jawa Tengah tahun 2006-2009, hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM di Jawa Tengah sebesar 0,208. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 0,153434 terhadap IPM, hal ini menunjukkan apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1% maka akan meningkatkan IPM Jawa Tengah sebesar 0,153. Dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 0,274209 terhadap IPM, hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio
--	--	---------------------------------	---

			belanja modal yang dikeluarkan mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM Jawa Tengah sebesar 0,274.
--	--	--	---

## F. Hipotesis Penelitian

Pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Keberhasilan pembangunan manusia bisa dilihat dari semakin berkurangnya kemiskinan dan pengangguran. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur maka tidak mempunyai pendapatan tetap dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hal ini akan menyebabkan seseorang itu berada dalam kelompok miskin. Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengkonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati kehidupan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi semuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia disuatu daerah.

Sebagai bahan acuan peneliti merumuskan hipotesis yang telah dirumuskan oleh peneliti sebelumnya yaitu Nursiah Chalid dan

Yusbar Yusuf, (Universitas Riau : Jurusan Ilmu Ekonomi, 2014)  
*“Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau”*.

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena baru didasari teori bukan fakta. Soeratno dan Lincolin Arsyad mengungkapkan bahwa :

Hipotesis berasal dari kata hipo (*hypo*) dan tesis. Hipo berarti kurang dari dan tesa berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai tesis. Sifat sementara dari hipotesis ini mempunyai arti bahwa suatu hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat. Hal ini dimungkinkan karena hipotesis yang diperoleh biasanya tergantung pada masalah yang diteliti dan konsep-konsep yang digunakan.<sup>38</sup>

Berdasarkan paparan teoritis dan parametik, maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- $H_0$  : Diduga tidak terdapat pengaruh tingkat kemiskinan dan pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten Tahun 2010-2015.
- $H_a$  : Diduga terdapat pengaruh tingkat kemiskinan dan pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten Tahun 2010-2015.

---

<sup>38</sup> Soeratno & Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2008), 19.